VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ETIKA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN BANJIR PERKOTAAN KHUSUSNYA PADA IBUKOTA KABUPATEN TOLITOLI

Nuraisyah[1)], Muh akbar maraila[2)], Andri fahreza[3)], Rafika Sari Lasiara [4)]
Glean Rickardo leonar [5)] Julianti Amalia Imbran[6)]

[1]Prodi. Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
nuraisyah121270@gmail.com
[2]Prodi. Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
akbarmaraila@gmail.com
[3]Prodi. Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
andrifahreza06@gmail.com
[4]Prodi. Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
pikalasiara20@gmail.com
[5]Prodi. Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
glensiahaya654@gmail.com
[6]Prodi. Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
juliantiamalia14@gmail.com

ABSTRAK

Banjir tahunan di Kecamatan Baolan, ibukota Kabupaten Tolitoli, telah menjadi krisis yang berulang dan tidak semata-mata merupakan persoalan alam, tetapi juga persoalan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan banjir perkotaan di Kecamatan Baolan dari perspektif etika administrasi publik dan ekologi administrasi publik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan keduanya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil analisis menunjukkan tiga celah etika. Pertama, transparansi yang lemah, ditandai ketidaktahuan masyarakat terhadap kerawanan wilayahnya. Kedua, akuntabilitas yang dipertanyakan, karena banjir berulang dengan penyebab yang sama, termasuk banjir 2017 yang menewaskan 5 orang dan banjir 26 Oktober 2025 yang berdampak pada 1.345 rumah dan membuat 139 kepala keluarga mengungsi. Ketiga, keadilan sosial yang belum terpenuhi, karena kelompok rentan bermukim di sempadan Sungai Lembe. Secara ekologis, banjir merupakan hasil ketidakselarasan keputusan administrasi dengan daya dukung lingkungan, yang tampak pada kegagalan merespons topografi, alih fungsi lahan hulu menjadi kebun cengkeh, dan pendangkalan Sungai Lembe dan Sungai Tambun. Rekomendasi yang diajukan meliputi penataan ruang berbasis ekosistem dengan relokasi yang berkeadilan, restorasi daerah tangkapan air, penerapan infrastruktur hijau, serta sistem peringatan dini dan keterbukaan informasi rawan bencana.

Kata Kunci: Etika Administrasi Publik, Ekologi Administrasi, Banjir Perkotaan

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

Annual flooding in Baolan District, the capital of Tolitoli Regency, has become a recurring crisis that is not merely a natural problem but also a governance problem. This study aims to analyze urban flood management in Baolan District from the perspectives of public administration ethics and the ecology of public administration, and to formulate policy recommendations consistent with both. The study uses a descriptive qualitative approach with a case study design. Secondary data were collected through literature study and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The analysis reveals three ethical gaps. First, weak transparency, indicated by the public's lack of awareness of the flood risk in their areas. Second, questionable accountability, because floods recur from the same causes, including the 2017 flood that killed 5 people and the flood of 26 October 2025 that affected 1,345 houses and forced 139 households to evacuate. Third, unfulfilled social justice, because vulnerable groups live along the banks of the Lembe River. Ecologically, the floods result from a mismatch between administrative decisions and the carrying capacity of the environment, reflected in the failure to respond to the topography, the conversion of upstream land into clove plantations, and the siltation of the Lembe and Tambun rivers. The recommendations include ecosystem-based spatial planning with fair relocation, restoration of catchment areas, green infrastructure, and an early warning system with open disaster-risk information.

Keywords: Public Administration Ethics, Administrative Ecology, Urban Flood

Submisi: 26-10-2026
Diterima: 27-10-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu masalah klasik yang sering terjadi pada wilayah perkotaan. Dalam pengertian populer, banjir diartikan sebagai aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan jiwa, sedangkan dalam istilah teknik banjir diartikan sebagai aliran air sungai yang melampaui kapasitas tampung sungai tersebut (Nurhadi dkk., 2016). Di Kabupaten Tolitoli, khususnya di wilayah ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Baolan, banjir telah menjadi krisis tahunan yang terjadi berulang kali.

Permasalahan banjir di Kecamatan Baolan bersumber dari luapan air sungai yang tidak mampu menampung debit air dari wilayah hulu (dataran tinggi). Faktor lain yang memicu banjir adalah degradasi daerah tangkapan air hujan (*catchment area*), perubahan penggunaan lahan, serta pemanfaatan sempadan sungai. Persoalan ini diperparah oleh ketidaktahuan masyarakat tentang wilayahnya yang rawan dan berbahaya terhadap banjir. Bentuk topografi juga menjadi pemicu utama karena wilayah ini diapit dua pegunungan dan menjadi wilayah hulu aliran sungai yang ada di Kota Tolitoli. Banjir tahunan yang merusak terakhir kali terjadi pada 26 Oktober 2025 dengan 1.345 rumah terdampak dan 139 kepala keluarga (KK) mengungsi, setelah intensitas hujan yang tinggi membuat Sungai Lembe dan Sungai Tambun meluap ke permukiman warga. Adapun banjir tahun 2017 merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia.

Dari sudut pandang administrasi publik, banjir yang berulang dengan pola penyebab yang sama tidak semata-mata dapat dipandang sebagai bencana alam atau takdir. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian, pertanyaan yang relevan bukan hanya seberapa deras hujan yang turun, tetapi juga bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, mengelola anggaran, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat dalam menghadapi risiko yang sudah dapat diperkirakan. Inilah wilayah kajian etika administrasi publik, yaitu nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kewenangannya (Haerul & Herman, 2025).

Beberapa landasan etika relevan untuk membaca kasus ini. Teori keadilan Rawls (1971) menekankan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung, sehingga kebijakan publik semestinya memberi perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan. Dalam kasus banjir, air dapat mengalir ke mana saja, tetapi dampaknya tidak merata: masyarakat berpenghasilan rendah lebih sering terpaksa tinggal di daerah cekungan atau bantaran sungai. Etika deontologi Kant (1785/1998) menegaskan bahwa kewajiban moral berlaku terlepas dari hitungan untung-rugi, sehingga larangan membangun di sempadan sungai dapat dipahami sebagai kewajiban moral yang harus ditegakkan dan bukan sekadar imbauan. Cooper (2012) memandang administrator sebagai pihak yang memikul tanggung jawab etis atas peran jabatannya, sedangkan Adams dan Balfour (2015) mengingatkan adanya *administrative evil*, yaitu kerugian moral yang dapat timbul ketika aparatur menjalankan peran teknis-rasionalnya tanpa menyadari dimensi moral dari keputusan yang diambil.

Selain etika, banjir perkotaan perlu dibaca melalui ekologi administrasi. Riggs (1980) menjelaskan bahwa ekologi bermula dari bidang biologi sebagai kajian tentang interaksi organisme dengan lingkungannya, lalu berkembang menjadi ekologi manusia dan ekologi sosial, hingga melahirkan ekologi administrasi yang mengkaji hubungan antara pengambilan keputusan otoritatif dan lingkungannya. Gagasan pokoknya ialah bahwa sistem administrasi pemerintahan tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan terus berinteraksi dan saling memengaruhi dengan lingkungan fisik (alam dan geografis), ekonomi, sosial, maupun politik. Kondisi geografis dan biofisik memengaruhi beban kerja dan kebijakan administrasi, sementara keputusan administrasi seperti izin penggunaan lahan, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur secara langsung mengubah keseimbangan ekosistem fisik tersebut.

Kajian terdahulu di wilayah ini antara lain membahas implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli (Herald dkk., 2022) dan pemetaan bahaya banjir di Kecamatan Baolan (Ferdi dkk., 2021). Artikel ini melengkapi kajian tersebut dengan memandang penanganan banjir sebagai persoalan etika dan ekologi tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penanganan banjir perkotaan di Kecamatan Baolan, ibukota Kabupaten Tolitoli, dari perspektif etika administrasi publik dan ekologi administrasi publik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memutus siklus banjir tahunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, yaitu penanganan banjir perkotaan di Kecamatan Baolan sebagai ibukota Kabupaten Tolitoli. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam dalam konteks nyata, terutama keterkaitan antara keputusan pemerintah, kondisi lingkungan, dan kehidupan masyarakat yang terdampak.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data meliputi: (1) data kejadian banjir tahun 2017 dan 26 Oktober 2025 berdasarkan Pemberitaan ANTARA News (2025); (2) hasil penelitian terdahulu tentang kebijakan penanggulangan bencana dan pemetaan bahaya banjir di Kabupaten Tolitoli dan Kecamatan Baolan; (3) peta topografi wilayah Kecamatan Baolan; (4) peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; serta (5) literatur teori etika administrasi publik dan ekologi administrasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap kondensasi, data dipilah menurut dua kerangka analisis, yaitu perspektif etika administrasi publik (transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial) dan perspektif ekologi administrasi (respons terhadap topografi, dampak degradasi jangka panjang, dan ancaman

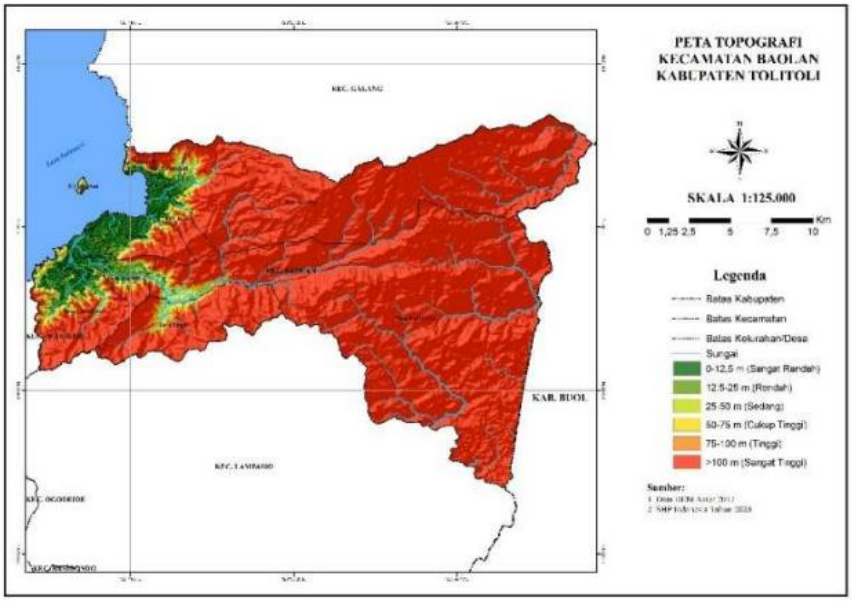
VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

terhadap ekosistem perkotaan). Data disajikan dalam bentuk narasi, gambar, dan tabel, kemudian disimpulkan melalui pembandingan berulang antara fakta kasus dan konsep teoretis. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Karena seluruh data bersifat sekunder, hasil penelitian ini bersifat analitis-konseptual dan belum menggambarkan persepsi langsung aparatur maupun masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Banjir Perkotaan di Kecamatan Baolan

Banjir di Kecamatan Baolan terjadi hampir setiap tahun dan menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Peristiwa terakhir pada 26 Oktober 2025 berdampak pada 1.345 rumah dan membuat 139 KK mengungsi akibat meluapnya Sungai Lembe dan Sungai Tambun setelah hujan berintensitas tinggi. Banjir tahun 2017 tercatat sebagai yang terparah dalam 10 tahun terakhir dengan 5 korban meninggal dunia. Peta topografi pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa dataran rendah dengan ketinggian 0–12,5 meter hanya menempati sebagian kecil wilayah di sisi barat yang berbatasan dengan pesisir, sedangkan sebagian besar wilayah lainnya berada pada ketinggian di atas 100 meter. Bentuk wilayah seperti ini cenderung membuat air dari hulu bergerak cepat menuju bagian hilir yang rendah, sehingga hujan berintensitas tinggi langsung memengaruhi debit Sungai Tuweley, Sungai Lembe, dan Sungai Tambun.



Gambar 1. Peta Topografi Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
Sumber: Ferdi, Maliki, dan Saputra (2022, Gambar 3).

Dari sisi penyebab, banjir di Baolan merupakan hasil interaksi faktor alam dan keputusan manusia: sungai tidak mampu menampung debit dari hulu, daerah tangkapan air terdegradasi, penggunaan lahan berubah, dan sempadan sungai dimanfaatkan sebagai permukiman. Sebagian besar sempadan Sungai Lembe bahkan telah menjadi tempat tinggal masyarakat. Karena itu, analisis etika dan analisis ekologi pada bagian berikut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi.

2. Analisis Etika Administrasi Publik

Dalam kacamata etika administrasi publik, banjir tidak semata-mata dipandang sebagai bencana alam, tetapi juga sebagai cerminan bagaimana tata kelola dan kebijakan dijalankan serta sejauh mana masyarakat dilindungi. Berdasarkan perspektif tersebut, penanganan banjir di Kecamatan Baolan menunjukkan tiga celah tata kelola.

a. Transparansi yang lemah

Ketidaktahuan masyarakat tentang wilayahnya yang rawan dan berbahaya terhadap banjir mengindikasikan bahwa informasi risiko bencana belum sampai kepada warga, atau pemerintah daerah belum memublikasikan peta risiko bencana secara memadai. Masyarakat berhak tahu (*right to know*) apakah tanah yang mereka tinggali berada pada zona merah banjir, sehingga mereka dapat bersiap atau memutuskan untuk tidak membangun di sana. Hak ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Tanpa informasi tersebut, warga menanggung risiko yang tidak mereka ketahui, dan pemerintah kehilangan salah satu instrumen pencegahan yang paling mendasar. Temuan ini bersifat indikatif karena didasarkan pada dokumen kasus, bukan pada audit keterbukaan informasi.

b. Akuntabilitas yang dipertanyakan

Banjir di Baolan adalah krisis tahunan dan berulang, dengan kejadian fatal pada 2017 dan banjir besar pada 2025. Terulangnya bencana dengan penyebab yang sama, yaitu degradasi hulu dan okupasi sempadan sungai, menunjukkan bahwa penegakan hukum tata ruang dan program mitigasi bencana belum dapat dipertanggungjawabkan efektivitasnya. Pemerintah belum sepenuhnya akuntabel dalam mengawasi dan menindak pelanggaran alih fungsi lahan, padahal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kerangka Cooper (2012), tanggung jawab administrator tidak berhenti pada pelaksanaan prosedur, tetapi mencakup kesediaan mempertanggungjawabkan hasil kepada publik. Dalam kerangka Adams dan Balfour (2015), banjir yang dianggap sebagai peristiwa rutin berisiko membuat persoalan moral tenggelam di balik rutinitas teknis, misalnya ketika penanganan berhenti pada respons darurat setiap musim hujan.

c. Keadilan sosial yang belum terpenuhi

Dampak banjir umumnya paling dirasakan oleh kelompok rentan yang terpaksa bermukim di bantaran (sempadan) sungai karena keterbatasan ekonomi. Pembiaran terhadap tata ruang yang buruk berarti pemerintah gagal memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga, sebagaimana dituntut oleh prinsip keadilan Rawls (1971). Pada saat yang sama, perspektif deontologi menuntut agar larangan membangun di sempadan sungai ditegakkan sebagai kewajiban moral, bukan imbauan, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 telah mengatur penetapan garis sempadan sungai. Kedua tuntutan ini dapat saling bertegangan: penertiban yang tegas tanpa solusi hunian justru memindahkan beban kepada warga miskin. Oleh karena itu, keadilan sosial menuntut pemerintah tidak hanya menormalisasi sungai dan menertibkan kawasan sempadan, tetapi juga menyediakan relokasi yang layak dan adil bagi warga yang terdampak penertiban.

3. Analisis Ekologi Administrasi

Dari kacamata ekologi administrasi, krisis banjir di Baolan adalah hasil ketidakselarasan antara kebijakan (atau ketiadaan kebijakan) pemerintah dan daya dukung lingkungan. Analisis ini juga menegaskan bahwa banjir tidak dapat dituntaskan hanya melalui pengerukan atau pelebaran sungai, karena persoalannya menyangkut hubungan antara hujan, debit sungai, kondisi daerah tangkapan air, penggunaan lahan, drainase, pasang air laut, dan aktivitas masyarakat.

a. Kegagalan merespons topografi

Secara ekologis, wilayah yang diapit pegunungan secara alami merupakan daerah tangkapan dan aliran air. Administrasi publik di Baolan belum mengadaptasi perizinan tata ruang dengan realitas topografi ini. Pembangunan permukiman yang dibiarkan menutupi daerah resapan air memperburuk limpasan permukaan (*surface runoff*). Dalam kerangka Riggs (1980), kondisi geografis kecamatan ini seharusnya memengaruhi kebijakan administrasi, sedangkan yang terjadi justru keputusan administrasi mengubah keseimbangan ekosistem fisik tanpa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.

b. Dampak degradasi jangka panjang

Peralihan fungsi lahan pegunungan di Kabupaten Tolitoli, khususnya di wilayah Kecamatan Baolan, menjadi perkebunan cengkeh milik masyarakat secara langsung mengubah kawasan yang seharusnya tetap berfungsi sebagai daerah resapan air. Hilangnya vegetasi hutan di hulu membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air hujan secara maksimal dan meningkatkan laju erosi yang kemudian mendangkalkan Sungai Lembe dan Sungai Tambun. Akibatnya, hujan praktis memengaruhi debit Sungai Tuweley, Sungai Lembe, dan Sungai Tambun secara langsung. Perlu dicatat bahwa kebun cengkeh merupakan sumber penghidupan masyarakat, sehingga respons kebijakan tidak dapat berupa pelarangan semata, tetapi harus disertai insentif ekonomi yang adil bagi warga.

c. Ancaman terhadap ekosistem perkotaan

Apabila kebijakan eksploitasi lahan di pegunungan dan pembiaran pelanggaran sempadan sungai diteruskan, keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang berpotensi rusak. Daya tampung sungai akan terus menurun, sementara intensitas curah hujan (hidrometeorologi) berpotensi meningkat akibat perubahan iklim global. Hasil akhirnya dapat berupa banjir yang semakin masif, melumpuhkan ekonomi kota, dan memicu krisis kesehatan lingkungan berupa wabah pascabanjir.

4. Keterkaitan Etika dan Ekologi

Kedua perspektif menunjukkan bahwa celah etika dan ketidakselarasan ekologis saling memperkuat. Informasi risiko yang tertutup membuat warga membangun di zona rawan; lemahnya akuntabilitas membuat alih fungsi lahan hulu berlangsung tanpa koreksi; dan ketiadaan skema relokasi yang adil membuat penertiban sempadan sulit dijalankan tanpa mengorbankan warga miskin. Sebaliknya, kerusakan ekologis memperbesar jumlah warga yang terdampak sehingga memperberat tuntutan etis terhadap pemerintah. Sintesis temuan dan arah rekomendasi dirangkum pada Tabel 1.

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

Tabel 1. Sintesis Temuan dan Arah Rekomendasi

Aspek	Temuan utama	Arah rekomendasi
Transparansi	Warga belum mengetahui kerawanan wilayahnya; peta risiko bencana belum sampai kepada publik	SIG rawan bencana yang dapat diakses publik, sistem peringatan dini, dan edukasi mitigasi
Akuntabilitas	Banjir berulang dengan penyebab yang sama; pengawasan alih fungsi lahan belum efektif	Audit ulang RTRW dan penguatan penegakan tata ruang
Keadilan sosial	Kelompok rentan bermukim di sempadan Sungai Lembe	Penertiban sempadan disertai relokasi yang layak (misalnya rusunawa)
Respons terhadap topografi	Perizinan dan permukiman belum selaras dengan fungsi tangkapan dan resapan air	Tata ruang berbasis ekosistem; sempadan sungai sebagai sabuk hijau
Degradasi hulu	Alih fungsi lahan menjadi kebun cengkeh, erosi, dan pendangkalan sungai	Moratorium izin pembukaan lahan, reboisasi, dan Perhutanan Sosial
Ancaman jangka panjang	Daya tampung sungai menurun dan curah hujan berpotensi meningkat	Infrastruktur hijau: sumur resapan, biopori, kolam retensi, taman kota

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026

5. Rekomendasi Kebijakan

Untuk memutus siklus banjir tahunan di Baolan, diperlukan intervensi kebijakan yang memadukan etika pelayanan publik dan pemulihan ekologi. Empat rekomendasi diajukan berdasarkan hasil analisis di atas.

Penegakan tata ruang berbasis ekosistem (*eco-spatial planning*). Pemerintah perlu mengaudit ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sempadan Sungai Lembe dan Sungai Tambun harus dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung (sabuk hijau atau *green belt*). Penertiban permukiman di sempadan dilakukan dengan pendekatan keadilan sosial melalui penyediaan hunian relokasi yang terintegrasi, misalnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Restorasi daerah tangkapan air (*catchment area*). Pemerintah perlu menetapkan moratorium izin pembukaan lahan di area hulu atau pegunungan dan melakukan reboisasi massal dengan melibatkan masyarakat lokal melalui skema Perhutanan Sosial, sehingga masyarakat memperoleh insentif ekonomi dari menjaga kelestarian hutan dan tidak dari merusaknya.

Penerapan infrastruktur hijau (*green infrastructure*). Penanganan banjir tidak cukup berfokus pada betonisasi sungai (*hard engineering*). Perlu diterapkan solusi ramah lingkungan seperti sumur resapan massal di permukiman, biopori, kolam retensi, dan taman kota yang berfungsi sebagai kota spons (*sponge city*) untuk menyerap kelebihan debit air hujan.

Sistem peringatan dini dan transparansi informasi terbuka. Pemerintah wajib memublikasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) rawan bencana yang dapat diakses masyarakat melalui gawai mereka. Edukasi mitigasi banjir perlu dimasukkan ke dalam

kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan menengah agar tercipta budaya sadar bencana sejak dini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, banjir tahunan di Kecamatan Baolan, ibukota Kabupaten Tolitoli, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bencana alam, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan. Dari perspektif etika administrasi publik ditemukan tiga celah, yaitu transparansi yang lemah karena warga belum mengetahui kerawanan wilayahnya, akuntabilitas yang dipertanyakan karena bencana berulang dengan penyebab yang sama, dan keadilan sosial yang belum terpenuhi karena kelompok rentan bermukim di sempadan sungai tanpa jaminan relokasi yang layak. Dari perspektif ekologi administrasi, banjir merupakan hasil ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan daya dukung lingkungan, yang tampak pada kegagalan merespons topografi, degradasi daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan hulu, serta ancaman terhadap ekosistem perkotaan dalam jangka panjang.

Memutus siklus banjir memerlukan intervensi yang memadukan etika pelayanan publik dan pemulihan ekologi, yaitu penataan ruang berbasis ekosistem dengan relokasi yang berkeadilan, restorasi daerah tangkapan air yang melibatkan masyarakat, penerapan infrastruktur hijau, serta sistem peringatan dini dan keterbukaan informasi rawan bencana. Penelitian ini terbatas pada data sekunder. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wawancara dengan aparatur pemerintah daerah dan warga terdampak, serta data hidrologi dan tata guna lahan yang lebih rinci, untuk menguji dan memperdalam temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, G. B., & Balfour, D. L. (2015). Unmasking administrative evil (4th ed.). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315718797

Cooper, T. L. (2012). The responsible administrator: An approach to ethics for the administrative role (6th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Ferdi, Maliki, R. Z., & Saputra, I. A. (2021). Pemetaan bahaya banjir di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, 12(1), 13–22. https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/issue/view/23/3

Haerul, & Herman, H. (2025). Etika administrasi publik: Pilar kepercayaan, keadilan, dan tata kelola yang baik. Makassar: ASHA Publishing. https://doi.org/10.63164/593010

Herald, W., Rahmah, M., & Hamdi, M. (2025). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana: Studi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 18(1). https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i1.4543

Kant, I. (1998). Groundwork of the metaphysics of morals (M. Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nurhadi, Sumunar, D. R. S., & Khotimah, N. (2016). Analisis kerentanan banjir dan penanggulangan bencana di daerah aliran Sungai Code Kota Yogyakarta. Jurnal Penelitian Saintek, 21(2), 75–86. https://doi.org/10.21831/JPS.V21I2.10553

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Riggs, F. W. (1980). The ecology and context of public administration: A comparative perspective. Public Administration Review, 40(2), 107–115. https://doi.org/10.2307/975620

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.